

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 ini dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka diharapkan kiranya kinerja kita meningkat di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang sehingga amanah yang kita emban dapat dipertanggungjawabkan penuh baik kepada masyarakat, Bangsa dan Negara maupun kepada Allah SWT.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua.

Rantau, Maret 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tapin



H. AULIA ULFAH, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690301 199803 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Gambar Organisasi.....	3
E. Aspek Strategis Oraganisasi.....	9
F. Permasalahan Utama (Stategic Issued).....	12
G. Sistematika Penyajian.....	12
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023.....	17
B. Penetapan Indikatoe Kinerja Utama	23
C. Perjanjian Kinerja.....	
D. Analisis Kinerja.....	
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	41
1. Perbandingan antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2021	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021	

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	
5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja	
B. Realisasi Anggaran.....	63
BAB IV : PENUTUP	67

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapin yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ditunjang oleh 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator, 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 100%. Sedangkan realisasi keuangan dari anggaran **Rp. 34.822.29.578,00** terealisasi sebesar **Rp.32.425.050435,00** atau sebesar 93,12 %, yang terdiri dari:

- Anggaran Belanja Tidak Langsung **Rp.33.856.493.002,00** terealisasi sebesar **Rp. 29.179.087.555,00** atau sebesar **86,18 %** yang digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
- Anggaran Belanja Langsung **Rp. 965.536.576,00** terealisasi sebesar **Rp. Rp. 577.620.526,00** atau sebesar **59,82 %**.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin kedepan dalam mencapai sasaran di semua bidang, antara lain:

1. Penambahan dan penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
5. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap sub bagian atau sub bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
6. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan sub bagian dan sub bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
7. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan dan arah kebijakan anggaran agar difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin khususnya bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik, serta mengacu pada Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2018 - 2023 sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha yang maksimal dari

setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggung jawab dan kerja keras setiap unsur aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, yang dipergunakan sebagai modal dasar di dalam mengemban visi dan misi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Gambaran Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Tapin, dimana tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Tapin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- b. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- e. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- f. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2. Struktur Organisasi

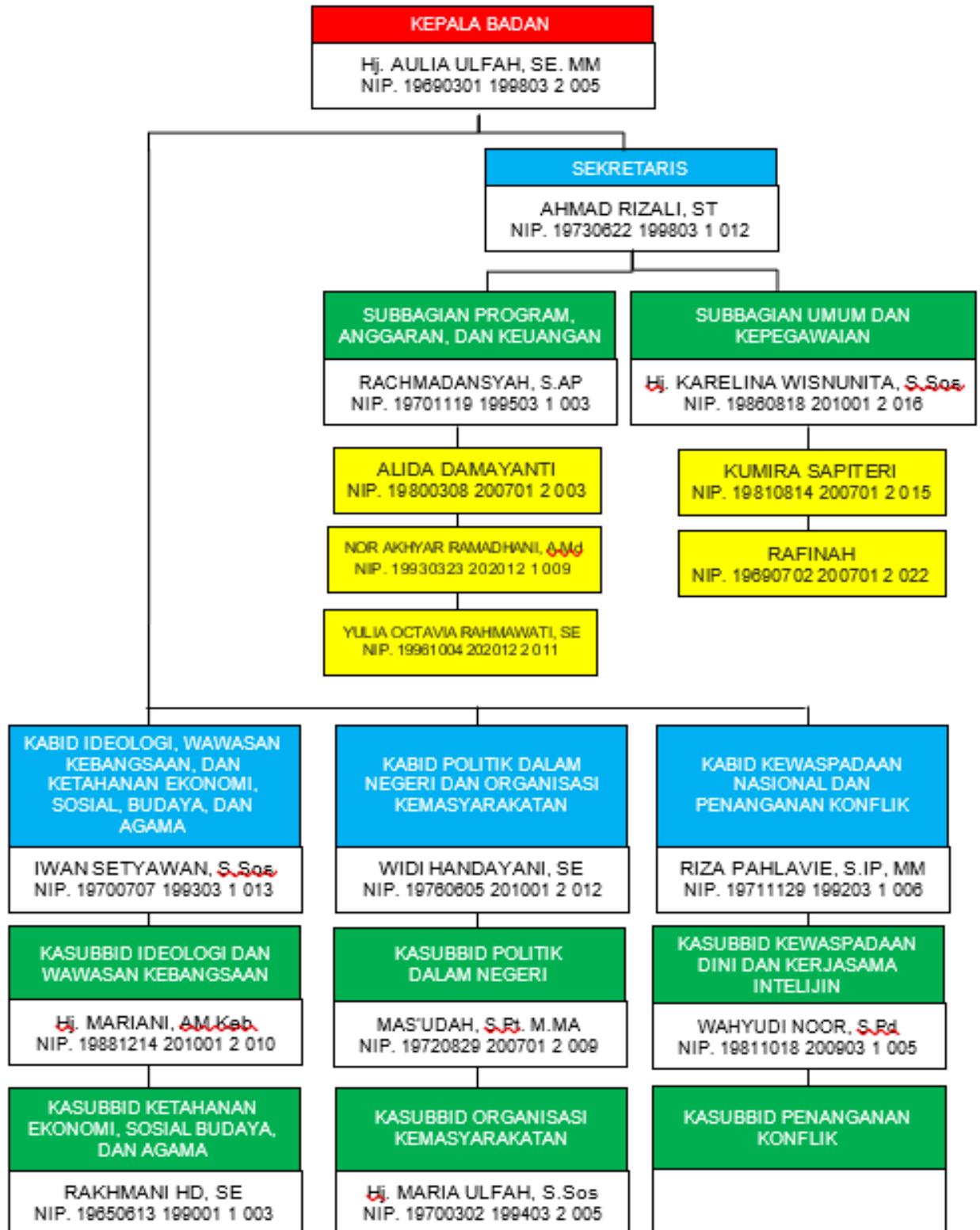
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) dan didukung dengan 1 orang Sekretaris (Eselon III) dan 3 orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 4 orang Analis Kebijakan (JFT) dan dibantu oleh 5 orang staf. Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah :

Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

No	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. Aulia Ulfah, SE., MM
2.	Sekretaris	H. Saidi, S.Pi
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Iwan Setyawan, S.Sos
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Helda Yuliani, SH
5.	Kepala Bidang Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Widi Handayani, SE, MM
6.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Rachmadansyah, S.AP
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Hj. Karelina Wisnunita, S.Sos, MM
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Hj. Maria Ulfah, S.Sos
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Mas'udah, S.PT, MMA
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Hj. Mariani, AM.Keb
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wahyudi Noor, S.Pd

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang struktur organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin maka dapat dilihat dalam gambar 1.1 Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013



3. Sumber Daya Manusia (Ketenagaan)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 berjumlah 16 (Enam belas) orang dapat disajikan susunannya sebagai berikut :

**Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun
2023**

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1 orang
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 orang
5.	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	1 orang
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
11.	Bendahara	1 orang
12.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
13.	Verifikator Keuangan	1 orang
14.	Pengurus Barang Pengguna	1 orang

17.	Pengadministrasi Umum	1 orang
	Jumlah	16 orang

PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2023

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 orang
2.	Golongan III	8 orang
3.	Golongan II	2 orang
	Jumlah	16 orang

PNS Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	4 orang
2.	S1	7 orang
3.	D3	2 orang
4.	SLTA	3 orang
	Jumlah	16 orang

E. Aspek Strategis Organisasi

Beberapa tantangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tapin, antara lain :

1. Peran Partai Politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Tapin
2. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai kebhinekaan atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen

melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat di Kabupaten Tapin

3. Upaya penanganan konflik sosial
4. Upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

Aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut juga telah dilaksanakan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program – program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Diterbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS); (2) RPP tindak lanjut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS); (3) Penyusunan Rencana Aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2014 ; serta (4) diterbitkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik dan memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2019 setiap tahunnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Tapin, dimana tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Tapin. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai hubungan kerja dengan Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan peningkatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tapin serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum di masyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Tapin serta pembentukan Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dengan melibatkan instansi terkait di daerah. Pembentukan forum-forum tersebut berlangsung efektif dan dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik.

Di samping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin akan melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan melalui kegiatan kerjasama

program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta memberikan izin pendirian kepada organisasi kemasyarakatan yang baru.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI di Kabupaten Tapin.

F. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu strategis oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menggunakan analisis sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis yaitu:

1. Masih adanya konflik sosial di masyarakat yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga, yang mencerminkan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2023 Selanjutnya capaian kinerja (performance results) tahun 2023 dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan)

tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) LRA (Realisasi keuangan dari Simda)
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Progres nilai hasil evaluasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 – 2022 sebagai berikut :

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2019	77,41	BB
2	2020	73,45	BB
3	2021	-	-
4	2022	73,85	BB

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Implementasi Renstra Dokumen Renstra belum direviu secara berkala oleh instansi yang menangani Pengelolaan Perencanaan	Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait yang menangani Pengelolaan Perencanaan agar menyusun pedoman reviu Dokumen Renstra
2.	Pengukuran Kinerja Masih terdapat IKU yang belum cukup untuk mengukur kinerja	Sudah dilakukan perbaikan terhadap IKU yang dianggap belum cukup untuk mengukur kinerja
3.	Laporan Kinerja belum menggambarkan Analisa yang komprehensif tentang efisiensi penggunaan sumber daya	Telah dilakukan perbaikan terhadap Laporan Kinerja dengan memasukkan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya
4.	Rapat monitoring kinerja belum terdokumentasikan dengan baik	Telah dilakukan perbaikan terhadap Kegiatan Rapat monitoring kinerja.
5.	Informasi kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian reward & punishment	Informasi kinerja telah dijadikan dasar untuk pemberian reward & punishment
6.	Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi	- Menggunakan TI utk pengukuran

		kinerja
7.	Belum dilakukan evaluasi Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja. Pemantauan yang dilakukan terhadap rencana aksi yang telah dilaksanakan belum ada alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kinerja	Telah dilakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja dan melakukan pemantauan rencana aksi serta memberikan alternatif perbaikan dalam rangka peningkatan dan pengendalian kinerja
8.	Pencapaian kinerja outcome yang dilaporkan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan	Telah dilakukan reviu secara berkala terhadap target kinerja yang telah disusun

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintah dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintah yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tapin dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tapin. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018 - 2023 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemerintah Kabupaten Tapin. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023.

A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapin serta Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Visi, Misi dan Tujuan dan Saaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Visi
<i>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</i>

Misi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing

Tujuan
Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin

Sasaran
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial keagamaan

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) (sebelum dan sesudah review) yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Sebelum Review

SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. <i>Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat</i>
3. Meningkatkan pembinaan terhadap Ormas

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sebelum Review

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Persentase potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan
2. Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan
3. Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan
4. Persentase pembinaan terhadap Ormas

Tabel 2.1
Sasaran Sesudah Review

SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
3. Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik

Tabel. 2.4
Indikator Kinerja Utama Sesudah Review

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan
2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan
3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan
4. Persentase Ormas yang berpartisipasi

B. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Indikator dan Program Kantor Kesbangpol Kab. Tapin

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1	2	3
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan 2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan 3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL (OUTCOME)	KELUARAN (OUTPUT)	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase Kasus/Kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	Meminimalisir Terjadinya Konflik Sosial Budaya	Terselesaikan nya Konflik Sosial Budaya	Jumlah potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan <i>dibagi</i> Jumlah potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya <i>dikali</i> seratus	Kasubbid Bidang Politik dan Wasnas (JFT)	Monitoring langsung ke daerah yang dirasa rawan terjadi konflik	Meminimalisir bahaya terjadinya konflik Sosial Budaya
						Melaksanakan Sosiolisasi kepada Masyarakat	
						Melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik	
						Melaksanakan koordinasi dengan Masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan	Memaksimalkan koordinasi dengan pihak masyarakat
	Persentase Kasus/Kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	Meminimalisir Terjadinya Konflik Agama	Terselesaikan nya Konflik Agama	Jumlah potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan <i>dibagi</i> Jumlah potensi kasus/kejadian konflik agama <i>dikali</i> seratus	Kasubbid Bidang Politik dan Wasnas (JFT)	Monitoring langsung ke daerah yang dirasa rawan terjadi konflik	Meminimalisir bahaya terjadinya konflik Agama
						Melaksanakan Sosiolisasi kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan	
						Melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik	
						Melaksanakan koordinasi dengan Masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan	Memaksimalkan koordinasi dengan pihak masyarakat
	Persentase Kasus/Kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	Meminimalisir Terjadinya Konflik Ekonomi	Terselesaikan nya Konflik Ekonomi	Jumlah potensi kasus/kejadian ekonomi yang diselesaikan <i>dibagi</i> Jumlah potensi kasus/kejadian konflik ekonomi <i>dikali</i> seratus	Kasubbid Bidang Politik dan Wasnas (JFT)	Monitoring langsung ke daerah yang dirasa rawan terjadi konflik	Meminimalisir bahaya terjadinya konflik Ekonomi
						Melaksanakan Sosiolisasi kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan	
						Melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik	
						Melaksanakan koordinasi dengan Masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan	Memaksimalkan koordinasi dengan pihak masyarakat
Meningkatnya partisipasi ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi (%)	Pembinaan Ormas yang berpartisipasi pada pembangunan Kabupaten Tapin	Tersedianya data Ormas Seluruh Kabupaten Tapin dan Ormas yang ikut Berpartisipasi	Jumlah Ormas yang berpartisipasi <i>dibagi</i> Jumlah Ormas yang terdata <i>dikali</i> seratus	Kasubbid Ket. Seni, Budaya, AKE (JFT)	Menggunakan Web Sinormas untuk pendaftaran dan pendataan Ormas yang ada di Kabupaten Tapin	Peningkatan jumlah ormas yang terdaftar dan terdata
						Melaksanakan koordinasi dengan pihak ormas untuk saling berpartisipasi pada pembangunan Kabupaten Tapin	Peningkatan jumlah ormas yang berpartisipasi pada pembangunan Kabupaten Tapin

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Formulir Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Esselon 2	a. Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%
			2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%
			3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%
			b. Meningkatnya partisipasi ormas dalam rangka stabilitas politik	1. Persentase Ormas yang berpartisipasi (%)
2	Esselon 3 (Sekretariat)	a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan Pada LKIP SKPD	5%
			b. Pelayanan Sarana dan Prasarana Dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD
		c. Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%
				Persentase ASN Yang Mengikuti

			Pelatihan / Bimtek dan Mendapatkan Sertifikat	
		d. Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset Yang Tercatat	100%
			Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	70%
3.	Esselon 3 (Bid Wasnas)	a. Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%
4.	Esselon 3 (Bid Ideologi)	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100%
		b. Meningkatnya fasilitasi kerukunan umat beragama	Persentase terlaksananya rakor FKUB	100%
5.	Esselon 3 (Bid Poldagri)	a. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dan kualitas organisasi partai politik	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%

		b. Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	80%

6. Esselon IV (Sub Bagian Program Anggaran Dan Keuangan)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun perencanaan dan peloporan kinerja SKPD	Nilai komponen pelaporan pada LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
		Nilai komponen perencanaan pada LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
		Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	100%
	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 Buku

7. Esselon IV (Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	2 Dokumen
		Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	10 Dokumen
		Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	18 Orang
2.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah aset yang diadakan	1 Dokumen

8. Esselon IV (Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-undangan Ormas	50 Orang
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas	26 Orang

9. Esselon IV (Sub Bidang Politik Dalam Negeri)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan	10 Parpol
2.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bid. Politik	50 Orang
		Jumlah Peserta Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah	50 Orang
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat	50 Orang
3.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah peserta Rakor Tim Verifikasi Persyaratan Adm Pencairan Bantuan	32 Orang

	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Keuangan Kpd Parpol	
		Jumlah Peserta Raker/Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Kepada Parpol	60 Orang
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	20 Orang

10. Esselon IV (Sub Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam PPWK	30 Orang
		Jumlah orang yang berpartisipasi dalam FPK	48 Orang
		Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Revolusi Mental	122 Orang
	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Krakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi wasbang	50 Orang
		Jumlah peserta sosialisas Bela Negara	50 Orang
		Jumlah peserta sosialisasi Pembauran Kebangsaan	50 Orang
		Jumlah kegiatan PHBSN yang dilaksanakan	7 Kegiatan

11. Esselon IV (Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Rakor P4GN	50 Orang
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Rakor FKUB	56 Orang
2.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan P4GN	50 Orang
		Jumlah peserta pembinaan umat beragama	50 Orang
		Jumlah peserta sarasehan dialog tokoh agama dan ormas keagamaan	50 Orang

12. Esselon IV (Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijin)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	13 Orang
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	26 Orang

13. Esselon IV (Sub Bidang Penanganan Konflik)

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penanganan Potensi Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	3 Kasus

14. Bendahara Pengeluaran

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima, Mengecek dan Menginput SPJ	Jumlah Lembar	315
2.	Membuat SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil	Jumlah Lembar	80
3.	Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab GU, TU, dan LS	Jumlah Lembar	80
4.	Membuat Surat Permohonan UP	Jumlah Lembar	1
5.	Menginput Pajak Gaji, Tunjangan dan Kegiatan	Jumlah Lembar	140

6.	Membuat Absensi Pegawai	Jumlah Lembar	135
7.	Mencatat Buku Bank	Jumlah Lembar	30

15. Pengurus Barang

No.	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengetik Surat Keluar	Jumlah Dokumen	115
2.	Menyiapkan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat/Gaji	Jumlah Dokumen	1
3.	Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Surat	230
4.	Menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	42
5.	Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan Tahunan	Jumlah Surat	8
6.	Melaksanakan Tugas Tambahan yang Diperintahkan oleh Atasan	Jumlah Kegiatan	13
7.	Menginput Barang Pengadaan	Jumlah Dokumen	1

16. Pengadministrasi Umum

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membuat Rekapitulasi Absen Pegawai	Jumlah Laporan	12 Laporan
2.	Membuat Daftar Absen Pegawai	Jumlah Daftar	12 Daftar
3.	Mendistribusikan Surat dan Desposisi Pimpinan	Jumlah Surat	300 Surat

17. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membantu Menyusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen

18. Verifikator Keuangan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meneliti kelengkapan, kebenaran dan validitas dokumen pengajuan anggaran sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kelengkapan dan validitas dokumen pengajuan	60 Dokumen

D. Analisis Kinerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan SKPD dalam mencapai visi misinya adalah kinerja pegawai. Kinerja pegawai dari tingkat pelaksana, eselon IV atau (JFT), eselon III hingga eselon II dimulai dari dibuatnya Rencana Aksi. Rencana Aksi memuat tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal.

Rencana Aksi memuat rencana program kegiatan, target dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjalanannya Rencana Aksi yang dievaluasi setiap triwulan akan mengukur kinerja tiap tiap bidang. Yang mana pada akhirnya Rencana Aksi akan melahirkan *reward* dan *punishment*.

Untuk melihat capaian kinerja secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya masing – masing. Selanjutnya setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capain kinerja;
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran;
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/relokasi anggaran;
5. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambila kebijakan;
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja; dan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingancapaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2023 meliputi 2 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85 %	100%	117,65 %
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85 %	100%	117,65%
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
2.	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	62,68%	125,37%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 secara umum target kinerja dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
2.	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
3.	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	100%	117,65%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah > 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian **sangat berhasil**.

Rumusan IKU :

1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan =

$$\frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik sosial budaya yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik sosial budaya}} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Capain kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% =$$
$$= \frac{100}{85} \times 100\% = \mathbf{117,65\%}$$

**Daftar Kasus/Kejadian Konflik Sosial Budaya
Di Kabupaten Tapin Tahun 2022**

No.	Pihak Yang Bersengkata	Permasalahan	Lokasi	Ket
1.	PT. HCT dengan Warga Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Terkait sengketa plasma antara PT. HCT dengan Warga Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan	Telah dilaksanakan mediasi

Dari 1 (satu) kasus/kejadian konflik sosial budaya yang terjadi pada tahun 2022 dapat diselesaikan dengan cara mediasi antar pihak perusahaan dan warga Desa.

2. Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik agama yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik agama}} \times 100\%$$

Karena pada tahun 2023 tidak terjadi kasus/kejadian konflik agama, maka tidak ada juga kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan. Oleh karena itu, realisasi nya adalah sebesar 100%.

Capain kinerja :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \\ & = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 di Kabupaten Tapin tidak terjadi kasus/kejadian konflik agama. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tapin kerukunan umat beragama begitu terjaga. Kerukunan umat beragama terjadi karena antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Masalah kerukunan umat beragama dan antarumat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama, terus berkejolak, meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tapin.

3. Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik ekonomi yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik ekonomi}} \times 100\%$$

Karena pada tahun 2023 tidak terjadi kasus/kejadian konflik ekonomi, maka tidak ada juga kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan. Oleh karena itu, realisasi nya adalah sebesar 100%.

Capain kinerja :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \\ & = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 kasus/kejadian konflik ekonomi di Kabupaten Tapin tidak terjadi.

Tabel. 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50 %	62,68 %	125,37%

Dari target yang ditetapkan yaitu 50% terealisasi sebesar 62,68% dengan capaian kinerja 125,37%.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah 125,37% yang berarti masuk dalam kategori capaian **sangat berhasil**.

Dari 67 (enam puluh tujuh) yang terdata terdapat 49 (empat puluh sembilan) Ormas, 11 (sebelas) Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), 2 Semi Pemerintahan dan 5 Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang turut memberitahukan keberadaannya pada “sinormas” Kabupaten Tapin.

Dari Total 67 (enam puluh tujuh) yang terdata, 42 (empat puluh dua) Ormas, OKP, Semi Pemerintahan dan LSM yang dinilai aktif berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tapin.

Rumusan IKU :

Persentase Ormas yang berpartisipasi =

$$\frac{\text{Jumlah Ormas yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Ormas yang terdata}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{67} \times 100\% = 62,68\%$$

Capain kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{62,68}{50} \times 100\% = 125,37\%$$

Dari 67 (enam puluh tujuh) Ormas/LSM yang terdata di website “sinormas” hanya 42 (empat puluh dua) Ormas/LSM yang berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tapin.

Data Ormas Yang Berpartisipasi Tahun 2022

No	Nama Organisasi	Bentuk
1.	PC Nahdlatul Ulama Kab. Tapin	Keagamaan
2.	Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin (DAD Kab. Tapin)	LSM
3.	Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR)	Ormas

4.	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT)	Ormas
5.	Karang Taruna	Semi Pemerintahan
6.	Asyiyah	Ormas
7.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	Ormas
8.	Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu Tapin Mandiri (LSM Bestari)	LSM
9.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Ormas
10.	Palang Merah Indonesia (PMI)	Ormas
11.	Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU)	Ormas
12.	Pramuka Kwartir Cabang Tapin	Ormas
13.	Majelis Ulama Indonesia Kab. Tapin (MUI Kab. Tapin)	Ormas
14.	Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Kabupaten Tapin (FKPMKT)	LSM
15.	Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)	Ormas
16.	Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapin (BAPARA Kab. Tapin)	Ormas
17.	Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (ICM)	Ormas
18.	Team Rescue Tapin (TRT)	Ormas
19.	Muhammadiyah	Ormas
20.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Semi Pemerintah
21.	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Ormas
22.	National Paralympic Committee Kab. Tapin (NPC Kab. Tapin)	Ormas
23.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Ormas
24.	Pemuda Panca Marga Kabupaten Tapin (PPM Tapin)	Ormas
25.	Pemuda Muhammadiyah	Ormas
26.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	Ormas
27.	Perkumpulan Relawan Satuan Cepat (Relawan Sapat)	Ormas
28.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI)	Ormas
29.	Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)	Ormas
30.	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Ormas
31.	Team Rescue Binuang	Ormas
32.	Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana	Ormas
33.	Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKIMDO)	Ormas

34.	Kamar Dagang dan Industri Kab. Tapin (KADIN)	Ormas
35.	Fatayat Nahdlatul Ulama (FATAYAT NU)	Ormas
36.	Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Musik Republik Indonesia (PAPPRI)	Ormas
37.	Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI)	Ormas
38.	Gerakan Lestari Seni Budaya Tapin	Ormas
39.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Ormas
40.	Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	OKP
41.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	OKP
42.	Apsi (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia)	Semi Pemerintah

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada *tabel 3.4* di bawah ini:

Tabel 3.4

Tujuan	Sasaran (Outcome)	IKU	2020		2021		2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	87,50%	109,37%	100 %	117,65 %
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	100%	125%	100 %	117,65 %
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	100%	125%	100 %	117,65 %
	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	100%	54,24%	116,67%	62,28 %	125,37 %

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dengan demikian dapat dikatakan realisasi kinerja dan capaian kinerja stabil dikarenakan konflik yang terjadi di daerah Kabupaten Tapin dapat teratasi dengan baik dan dapat dikatakan bahwa penanganan konflik diartikan berhasil.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada *tabel 3.5* di bawah ini:

Tabel 3.5

Tujuan	Sasaran (Outcome)	IKU	2022		2021		2020		2019	
			Realisasi	Capaian Kinerja						
Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	100 %	117,65 %	100%	117,65%	85%	100%	87,50%	109,37%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100 %	117,65 %	100%	117,65%	100%	117,65%	100%	125%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	100 %	117,65 %	100%	117,65%	85%	100%	100%	125%
	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	62,28 %	125,37 %	54,24%	108,48%	50%	50%	70%	116,67%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
2.	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	62,28 %	125,37%

Dari perhitungan pencapaian target Indikator Kinerja Utama diatas yakni dapat disimpulkan bahwa ke-empat (4) IKU kategori pencapaian kinerjanya adalah > 100 % dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2022 dan 2023 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan adalah Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban & ketentraman masyarakat dengan memberdayakan forum-forum / Tim - Tim yang melibatkan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kasus/kejadian konflik seperti Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah, Tim Penanganan Konflik Sosial, dan tim-tim lainnya serta dengan meningkatkan pembinaan terhadap Ormas/LSM.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, sebuah keprihatinan akan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di Kabupaten Tapin. Berbagai peristiwa konflik yang terjadi biasanya dilatarbelakangi dengan beberapa motif, seperti konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik

pertambangan, konflik pemilukada, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Adapun penyebab paling krusial terjadinya konflik di Indonesia antara lain terkait distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya alam, masalah adat kebudayaan dan identitas, distorsi penegakan hukum dan keadilan, disfungsi aparat keamanan. Dengan kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapin menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menyikapi permasalahan dan potensi yang dimiliki di atas diperoleh sebuah keyakinan bahwa metodologi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dalam daerah terkait konflik sosial adalah melalui dialog-dialog yang efektif. Untuk itu dalam program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten terdapat kegiatan pendekatan melalui penguatan forum-forum dialog yang terdapat di masyarakat khususnya forum yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Tapin dengan dasar Permendagri sebagai upaya penciptaan rasa aman, terlindungi dan stabilitas kerukunan dalam masyarakat.

Terhadap indikator tersebut di atas, sasaran strategis Renstra Badan Kesbangpol Kab. Tapin pada tahun 2022 menargetkan 85% kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan, 85% kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan dan 85% kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan. Kedua forum yang ada di daerah yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapin dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik. Memperhatikan forum-forum yang ada tersebut diperoleh hasil yang cukup menggembirakan. Selanjutnya meskipun bukan sebagai faktor tunggal, forum-forum dan tim-tim yang ada telah memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif

antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial budaya, agama dan ekonomi.

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan sangat penting. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas juga tak lepas dari keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama) dengan Sasaran Program/Kegiatan “Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik” dengan Indikator Kinerja “Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani”. Dari kasus/kejadian konflik sosial budaya, konflik agama dan konflik ekonomi semua dapat ditangani dengan baik. Sehingga Indikator Kinerja “Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani” dengan target 85% dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 117,65% (kategori capaian Sangat Berhasil).

Untuk keberhasilan pencapaian IKU “Persentase Ormas yang berpartisipasi” dengan capaian kinerja sebesar 125,37%, hal tersebut karena keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan) dengan Sasaran

Program/Kegiatan “Meningkatnya pendataan terhadap Ormas” dengan Indikator Kinerja “Persentase Ormas yang terdata”.

Dengan adanya website sinormas, Ormas/LSM dapat dengan mudah melaporkan keberadaannya secara online tanpa datang langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Sehingga Indikator Kinerja “Persentase Ormas yang terdata” dengan target 50% dapat terealisasi sebesar 62,28%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 125,37% (kategori capaian Berhasil).

Untuk keberhasilan dari capaian kinerja Kinerja Program dari Pejabat Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	85%	100%	117,65%
2.	Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	50%	62,28%	125,37%

5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2023 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya, untuk pencapaian indikator kinerja utama ke 1 s.d ke 3 tidak terlepas dari dukungan melalui beberapa program antara lain :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

melalui pelaksanaan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan Wawasan Kebangsaan
2. Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional (PHBSN)
3. Diskusi/Sarasehan Bela Negara
4. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
5. Proklamasi RI

6. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
7. Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
8. Revolusi Mental

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik :

1. Bantuan Keuangan untuk Partai Politik
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik
3. Sosialisasi Perkembangan Politik di Daerah
4. Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat
5. Raker/Rakor Tata Cara Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
6. Kegiatan Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kab. Tapin
7. Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
8. Pemilu Serentak Tahun 2024
9. Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Pembinaan Umat Beragama
2. Kegiatan Penyuluhan P4GN
3. Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan
4. Rakor FKUB
5. Rakor P4GN

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Kemuspidaan
2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
3. Kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing
4. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang koordinasi Intelijen Negara, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan di bidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006.

Secara berkala Badan Kesbangpol Kab. Tapin mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan forum-forum dan tim-tim tersebut di atas untuk membahas masalah-masalah yang terjadi terkait dengan tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu kegiatan Dialog/Interaktif tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran bela negara serta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dengan sasaran pelajar dan Ormas juga mampu menekan angka konflik pada tahun 2023.

Setiap tahunnya Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaporkan rencana aksi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Dirjen Polpum Kemendagri RI.

Sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja utama ke 4 yaitu: **Persentase Ormas yang berpartisipasi** tidak terlepas dari dukungan program yaitu : **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan melaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas.
2. Sistem Informasi Ormas

3. Pengawasan Ormas

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan sangat penting. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Di Kabupaten Tapin hanya 67 (enam puluh) Ormas/LSM yang dicatat sebagai Ormas/LSM yang terdata dan di bawah binaan Pemerintah daerah / Kesatuan Bangsa dan Pol. Ormas ada yang pembentukannya berjenjang dan tidak berjenjang. Ormas yang berjenjang adalah Ormas yang kedudukannya sudah ada di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Ormas yang tidak berjenjang adalah Ormas yang kedudukannya hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yang berjenjang, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas yang berjenjang tidak perlu lagi mendaftarkan ke Kemendagri, Ormas hanya melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah daerah / Kesbangpol setempat, sedangkan Ormas yang tidak berjenjang wajib membuat SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

melalui Kemendagri RI dan juga melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah daerah / Kesbangpol setempat.

Untuk menciptakan tertib administrasi pendataan Ormas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, semula dilaksanakan secara manual sehingga sulit dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Oleh sebab itu perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, memungkinkan kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan teknologi. Maka Badan Kesbangpol Kab. Tapin membuat Aplikasi Pendataan Ormas Berbasis Web dengan nama "sinormas". Sehingga memudahkan Ormas dalam melaporkan keberadaannya di Kabupaten Tapin.

Setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rutin melaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas dengan mengundang Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perundang-Undangan Ormas terbaru agar Ormas/LSM paham tentang Undang-Undang Ormas terbaru. Disamping itu kegiatan tersebut bertujuan untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas/LSM namun bukan membatasi gerak Ormas/LSM sendiri, tapi dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM. Pengawasan dan pembinaan bagi Ormas dan LSM sangat penting karena Ormas/LSM adalah lembaga non pemerintah dan sebagai mitra bagi pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja **Sasaran 1** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja **Sasaran 1** yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6.462.626.723 ,00	5.287.595.500,00	81,82
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6.462.626.723 ,00	5.287.595.500,00	81,82
II.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	1.292.173.842,00	981.847.100,00	75,98

	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.292.173.842,00	981.847.100,00	75,98
	Jumlah	7.754.800.565,00	6.269.442.600,00	80,84

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada **sasaran 1** dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama adalah > **100%**, sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu sebesar **82,54 %**. Artinya pada **sasaran 1** ini **terjadi efisiensi sumber daya** karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

Capaian indikator kinerja **Sasaran 2** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	62,68%	125,37%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja **Sasaran 2** yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		69.100.000,00	40.790.000,00	59,03
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69.100.000,00	40.790.000,00	59,03

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada **sasaran 2** dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama adalah 125,37%, lebih tinggi pada capaian penggunaan sumber daya keuangan pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pendukung capaian kinerja tersebut yaitu sebesar 64,84%. Artinya pada sasaran 2 ini terjadi efisiensi sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2023, dapat dilihat realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada *Tabel 3.6* dan *Tabel 3.7* berikut :

Tabel 3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Perubahan APBD 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.145.287.633,00	Rp. 6.514.509.935,00	91,17

1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.400.750,00	Rp. 7.399.550,00	99,98
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.615.741.908,00	Rp. 2.414.402.328,00	92,30
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.564.613.783,00	Rp. 2.521.037.752,00	98,30
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 774.587.394,00	Rp. 704.901.000,00	91,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 589.899.812,00	Rp. 476.422.833,00	80,76
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 587.696.366,00	Rp. 384.999.972,00	65,51

2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 6.462.626.723,00	Rp 5.287.595.500,00	81,82
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 6.462.626.723,00	Rp 5.287.595.500,00	81,82
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 19.521.481.880,00	Rp 19.309.627.900,00	98,91
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 19.521.481.880,00	Rp 19.309.627.900,00	98,91
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 69.100.000,00	Rp40.790.000,00	59,03

	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 69.100.000,00	Rp. 40.790.000,00	59,03
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 331.359.500,00	Rp. 290.680.000,00	87,72
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 331.359.500,00	Rp. 290.680.000,00	87,72
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.292.173.842,00	Rp. 981.847.100,00	75,98
	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.292.173.842,00	Rp. . 981.847.100,00	75,98
Jumlah		Rp. 34.822.029.578,00	Rp. 32.425.050.435,00	93,12

Tabel 3.7

Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2.620.841.908,00	2.419.502.328,00	92,31
2.	Belanja Barang dan Jasa	7.597.005.294,00	5.596.715.257,00	73,67
3.	Belanja Hibah	23.638.645.800,00	23.523.865.800,00	99,51
4.	Belanja Modal	965.536.576,00	884.967.050,00	91,65
Total		34.822.029.578,00	32.425.050.435,00	93,12

Berdasarkan informasi pada *tabel 3.6* bahwa belanja langsung untuk alokasi 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 34.822.029.578,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 32.425.050.435,00** atau terserap **93,12 %** (dapat dilihat pada lampiran Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2023), sedangkan informasi pada *tabel 3.7* anggaran secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja alokasi anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 34.822.029.578,00** dan terealisasi sebesar **Rp 32.425.050.435,00** atau terserap **93,12 %**.

Besaran realisasi tahun 2023 sebesar **93,12 %** meningkat jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan untuk 6 (delapan) program dan 11 (tiga puluh tiga) kegiatan tahun 2022 yang sebesar **90.02 %**.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin bergantung pada kinerja Kantor. Kinerja yang mencapai nilai 100% mengindikasikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun, demikian dukungan masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting sehingga sasaran strategis ini menjadi tepat dan berdaya guna.

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tersajikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan, Persentase kasus / kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2023. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2023. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2023. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
4. Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik, Persentase Ormas yang berpartisipasi sebesar 62,28% dengan target awal 50% di tahun 2023. Capaian kinerja sebesar 125,37%. Untuk sasaran ini target kinerja juga tercapai.

Namun masih terdapat kendala utama dari pencapaian kinerja yaitu:

1. Dalam upaya mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin belum bisa menargetkan secara pasti jumlah potensi/kasus kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun karena kasus kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi bersifat kontinjensi, yang artinya kejadian yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Dalam arti penyelesaian kasus/kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi disini adalah selesai pada saat itu saja. Bisa saja kasus/kejadian konflik

sosial budaya, agama dan ekonomi itu kembali timbul pada tahun berikutnya.

2. Kurangnya SDM, sehingga kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini disusun. Semoga bisa menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di waktu yang akan datang.

Rantau, Maret 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Tapin,



Hj. Aulfa Ulfah, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690301 199803 2 005

DOKUMENTASI KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

**DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI BUPATI DAN JAJARAN DI LINGKUNGAN PEMKAB TAPIN**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN ORMAS**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
PERINGATAN HAR KESAKTIAN PANCASILA**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK**

1. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan MOU belanja hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, antara Pj. Bupati Tapin Bapak Muhammad Syarifuddin, M.Pd Dengan Ketua KPU Kabupaten Tapin Bapak Fakhrian Noor, S.Pi.MH.



2. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan MOU belanja hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, antara Pj. Bupati Tapin Bapak Muhammad Syarifuddin, M.Pd Dengan Ketua BAWASLU Kabupaten Tapin Bapak



**DOKUMENTASI KEGIATAN
HARI SUMPAH PEMUDA**



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN TAPIN



1. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan MOU belanja hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dengan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, antara Pj. Bupati Tapin Bapak Muhammad Syarifuddin, M.Pd
Dengan Ketua KPU Kabupaten Tapin Bapak Fakhrian Noor, S.Pi.MH.



2. Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan MOU belanja hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, antara Pj. Bupati Tapin Bapak Muhammad Syarifuddin, M.Pd Dengan Ketua BAWASLU Kabupaten Tapin Bapak ABID FIKASI GULO, S.IP



3. Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMAN Salam Babaris

No.	URAIAN KEGIATAN	JLH. LAKI-LAKI	JLH. PEREMPUAN	KET
1.	Sosialisasi Pemilih Pemula SMAN Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin	35	65	
	JUMLAH PESERTA	35	65	

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 BAGI PEMILIH PEMULA (PELAJAR SLTA SEDERAJAT) DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2023
 Tempat : Aula SMAN 1 Salam Babaris
 Peserta : Siswa & Siswi SMAN 1 Salam Babaris



4. Kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula di SMAN Candi Laras Selatan

No.	URAIAN KEGIATAN	JLH. LAKI-LAKI	JLH. PEREMPUAN	KET
1.	Sosialisasi Pemilih Pemula SMAN Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin	40	60	
	JUMLAH PESERTA	40	60	

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 BAGI PEMILIH PEMULA (PELAJAR SLTA SEDERAJAT) DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juli 2023
 Tempat : Aula SMAN CLS/Dermaga Margasari
 Peserta : Siswa & Siswi SMAN 1 CLS



5. Kegiatan Bidang Wawasan Nasional dan Penanganan Konflik

Kegiatan Forkopimda Kabupaten Tapin

DOKUMENTASI KEGIATAN PISAH SAMBUT DAN RAMAH TAMAH DANDIM 1010 RANTAU

LETKOL ARH PRYONI PALEBANGAN, S.IP DAN LETKOL INF ANDI SINRANG

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Waktu : Pukul 20.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Tamasa Lantai 1 Sekertariat Daerah





Kegiatan Rakor Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Dini Potensi Konflik
Bidang
Pertanahan

No.	URAIAN KEGIATAN	JLH. LAKI- LAKI	JLH.PEREMPUAN	Ket
1.	Rakor Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Dini Potensi Konflik Bidang Pertanahan	32	18	
	JUMLAH PESERTA	32	18	

